

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (Studi di Desa Manembo Kec. Passi Timur Kab. Bolaang Mongondow)

Semi Serviko Salendu¹

Arpi Rondonuwu²

Johny Lengkong³

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Kepemimpinan Kepala Desa Manembo Dalam Mewujudkan Prinsip-prinsip Good Governance Di Desa Manembo Kec. Passi Timur Kab. Bolaang Mongondow. Saat ini paradigma *good governance* bagi aparatur Negara cenderung mengabaikan pentingnya melaksanakan pemerintahan yang baik, hal ini bisa di lihat dari para birokrat pemerintah baik itu di Kabupaten, Kecamatan maupun di Desa padahal dalam perspektif Otonomi Daerah di Indonesia, penerapan good governance merupakan suatu hal yang baik dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah atau local governance yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, mandiri serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian menggunakan teori Good Governance Mardiasmo (2009:18) yaitu dilihat dari ; transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Hasil penelitian disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala desa manembo dilihat dari transparansi dalam mewujudkan good governance belum berjalan dengan baik, ada beberapa kegiatan yang tidak di informasikan pemerintah dari beberapa kegiatan yang ada di desa manembo.

Kata Kunci: : *Kepemimpinan, Kepala Desa, Good Governance*

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Pemerintahan desa yang menyelenggarakan dalam berbagai urusan-urusan suatu kepentingan-kepentingan masyarakat dan pemerintahan setempat yang mana desa merupakan suatu tatanan unit terkecil dalam pemerintahan suatu negara. Negara dikatakan sangat sejahtera apabila desanya sudah sejahtera dan makmur, apabila suatu negara yang mana desanya belum memenuhi kriteria sejahtera maka negara tersebut belum bisa dikatakan sejahtera, di dalam kesejahteraan suatu negara masyarakat desa yang menjadi tolak ukur riil dalam melihat dimana tingkat kesejahteraan negara tersebut. Disahkannya undang-undang terbaru dengan Nomor 6 pada Tahun 2014 tentang Desa, mempunyai banyak tanggapan yang memunculkan berbagai elemen-elemen yang mendasar dengan menjadi suatu perbincangan-perbincangan mengenai distribusi dalam suatu kekuasaan yang diturunkan dari pusat ke tingkat-tingkat Desa, dengan adanya pembahasan mengenai adanya dana desa sebesar 10% dari APBN yang akan di sumbangsihkan di setiap Desa, dalam kondisi yang saat ini jika melihat dana APBN Indonesia maka setiap desa akan menerima dana desa sebesar 1 Milyar lebih dalam hal ini akan membawa hal positif ke tiap-tiap pemerintahan desa. Namun ada beberapa perbincangan mengenai dana desa tersebut dapat menjadi persoalan yang mana dengan adanya dana desa sedemikian besar yang akan di gelontarkan di desa dapat juga dikhawatirkan akan memunculkan banyaknya pelaku-pelaku koruptor yang ada di tingkat desa apabila dalam suatu pelaksanaan dalam pemerintahan desa tidak adanya penerapan tata kelola dalam pemerintahan desa yang baik.

Kepemimpinan dalam pemerintahan desa bertujuan untuk melaksanakan Good Governanceseperti dilakukannya suatu fungsi, kewenangan serta pelaksanaan dari tugas-tugas dan kewajiban yang dimiliki dalam pemerintah desa untuk melaksanakan berbagai hal dalam pelaksanaan, perencanaan di dalam pembangunan suatu desa, khususnya yang

juga berkaitan dengan suatu tata kelola dalam pemerintahan desa. Dalam membangun Good Governancesepada era reformasi saat ini dengan mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu hal yang sudah tidak bisa ditawarkan lagi dalam keberadaannya dan pastinya akan mutlak untuk terpenuhi. Adapun berbagai prinsip-prinsip dalam mewujudkan pemerintahan yang baik antara lain: (1) adanya partisipasi masyarakat guna membentuk berbagai suatu kegiatan-kegiatan dalam pemerintahan yang umum serta dalam pembangunan, (2) adanya suatu akuntabilitas yang merupakan suatu kewajiban-kewajiban guna untuk mempertanggungjawabkan dalam proses kinerjanya, dan (3) adanya suatu transparansi dan keterbukaan dalam masyarakat yang tidak hanya memberikan atau mengakses suatu bentuk kebijakan melainkan sebagai peran dalam proses membuat perumusannya.

Kepemimpinan Kepala Desa dalam melaksanakan tugas beserta wewenang yaitu untuk memimpin dalam upaya penyelenggara dalam pemerintahan yang berdasarkan suatu kebijakan-kebijakan yang juga ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna untuk mengajukan berbagai rancangan-rancangan mengenai peraturan desa, menetapkan berbagai peraturan-peraturan desa dengan mengena suatu anggaran-anggaran pendapatan dan juga belanja desa (APBDesa) yang mana dibahas dan juga ditetapkan berkaitan dengan BPD, untuk membina suatu kehidupan dalam masyarakat desa, mengoordinasikan dalam pembangunan desa yang secara partisipatif, dapat mewakili desanya masing-masing di dalam maupun diluar pengadilan untuk dapat menunjuk kuasa hukum yang mana untuk mewakili dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk membangun hubungan desa yang ideal dalam proses pembangunan desa maka diperlukan antara suatu lembaga desa tersebut. Dengan dibangunnya partisipasi yang bersifat menyeluruh dan juga saling menguatkan antar sesama lembaga yang ada di suatu desa, ketika dilihat dari Bahasa akademis maka hubungan yang saling menguatkan dapat dikenal dengan istilah tata

pemerintahan yang baik (good governance).

Mengenai hal tersebut kepemimpinan kepala Desa khususnya di Desa Manembo Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dalam mewujudkan *Good Governanced* dalam pengamatan awal peneliti kepemimpinan kepala desa manembo dalam mewujudkan good governance masih jauh dari apa yang diharapkan, hal ini di lihat dari prinsip good governance yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009:18) yaitu dilihat dari ; transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Beberapa permasalahan yang di dapati peneliti di Desa Manembo jika dilihat dari prinsip good governance antara lain yaitu :

1. Transparansi, dimanadari pengamatan peneliti pemerintah Desa Manembo kurang memberikan kebebasan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi,hal ini dikarekan dari informasi pemerintah desa kepada masyarakat masih banyak hal yang belum di informasikan sebagaimana apa yang telah dikerjakan itu infomrasi pemerintah desa sendiri maupun informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik atau kepentingan masyarakat Desa Manembo.
2. Partisipasi, dalam hal partisipasi salah satu masalah yang di dapati penliti yakni keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan atau dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau tidak langsung yang melalui lebag a permusyawaratan desa masih jauh dengan apa yang di harapkan. Hal ini dikarenkan masih ada sebagian masyarakat yang di dapati kurang berpartisipasi dalam pemerintah desa khususnya dalam hal membangun desa dengan memberikan aspirasi dimana sebagian masyarakat acuh tak acuh akan pembangunan desa.
3. Akuntabilitas, mengenai akuntabilitas dari pengamatan peneliti,pemerintah desa Manembo menjalankan program kerja drainase air atau (GOT).peneliti mendapat informasi bahwa masih ada masalah dalam menjalankan program kerja perbaikan drainase atau got,

contoh;Masalah pemilihan kepala bas atau pemborong yang mengambil banyak untung di proyek itu,sehingga timbul pertanyaan bagi sebagian masyarakat akan pertanggungjawaban dari pemerintah Desa Manembo.

Berdasarkan permasalahan dari 3 prinsip good governance dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan di Desa Manembo sehinga good governance (pemerintahan yg baik)belum efektif di lakukan oleh pemerintah yang ada di Desa Manembo.

Tinjauan Pustaka

Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan secara harfian berasal dari kata pimpin. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan ke-pemimpinannya. Menurut Wahjosumidjo (2005: 17) kepemimpinan di terjemahkan kedalam istilah sifat- sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola- pola, interaksi, hubungan kerja sama antarperan, kedudukan dari satu jabatan administratif, dan persuasif, dan persepsi dari lain- lain tentang legitimasi pengaruh. Miftah Thoha (2010: 9) kepemimpinan adalah kegiatan untuk memengaruhi perilaku orang lain, atau seni memengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisai karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Menurut C. Turney (1992) dalam Martinis Yamin dan Maisah (2010: 74) mandefinisikan kepemimpinan sebagai suatu group proses yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola dan menginspirasikan sejumlah pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi melalui aplikasi teknik- teknik manajemen. George R. Terry (Miftah Thoha, 2010: 5)

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

mengartikan bahwa Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. A. Dale Timple (2000: 58) mengartikan Kepemimpinan adalah proses pengaruh sosial di dalam mana manajer mencari keikutsertaan sukarela dari bawahan dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Dengan kepemimpinan yang dilakukan seorang pemimpin juga menggambarkan arah dan tujuan yang akan dicapai dari sebuah organisasi. Sehingga dapat dikatakan kepemimpinan sangat berpengaruh bagi nama besar organisasi. Menurut Sudarwan Danim (2004: 56) kepemimpinan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok yang tergabung di dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Konsep Good Governance

Konsep Good Governance yang mana kata Good dan Governance, dalam dua aspek tersebut juga memiliki makna dan arti yang berbeda. Good yang berarti baik, sedangkan Governance yang berarti suatu keadaan yang berada didalam kondisi yang terkendali didalam pemerintahan, dengan begitu terdapat adanya suatu interaksi-interaksi antara negara dan juga masyarakat sipil (Dewapayana, 2003:8). Good dalam arti Good Governance yang mengandung dua pengertian, yang pertama nilai-nilai yang menjunjung tinggi suatu keinginan maupun kehendak rakyat serta nilai yang dapat pula untuk meningkatkan dalam kemampuan-kemampuan rakyat untuk pencapaian suatu tujuan berupa kemandirian dalam suatu proses pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Dan nilai yang kedua, merupakan suatu aspek-aspek fungsional di pemerintahan yang efisien dan efektif didalam suatu pelaksanaan berbagai tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan.

Apabila didalam tatanan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu nilai-nilai ataupun gagasan-gagasan yang mengatur suatu pola antara hubungan dunia usaha swasta, pemerintahan, dan juga berbagai masyarakat sehingga dapat terjadinya suatu penyelenggaraan dalam pemerinthan yang demokratis, bersih, serta efektif yang sesuai dengan cita-cita akan terbentuknya suatu tatanan masyarakat yang mandiri, makmur dan sejahtera (Sedarmayanti, 2003:6).

Good governance dapat berorientasi dalam suatu sistem, proses, prosedur, dan juga berbagai peraturan-peraturan yang membuat entitas dapat bertindak dengan suatu panduan ataupun kerangka dalam rangka untuk memperoleh tujuannya dengan meningkatkan efisiensi dan juga efektifitas dalam penciptaan dalam berksinambungan antara beberapa tujuan yang ekonomis dan mencapai tujuan sosial, selain itu dalam good governance sendiri dapat mengusahakan berbagai keseimbangan dengan adanya suatu kepentingan-kepentingan yang dapat memberikan dampak positif seperti keuntungan bagi suatu entitas yang secara keseluruhan (Sedarmayanti, 2003:6), didalam suatu penyelenggaran negara yang harus juga ikut mempunyai kemampuan yang responsife, akuntabilitas serta adaptasi publik.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian memberikan batasan studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dalam pembatasan ini penelitian akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus penelitian ini sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yaitu menjawab pertanyaan "Bagaimana Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Mabembo Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow dengan menggunakan teori Good Governance Mardiasmo (2009:18) yaitu dilihat dari ; transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Di dalam wawancara terdapat dua aktor yang melakukan wawancara. Sebagai

penanya disebut pewawancara, sedangkan yang diwawancarai dan yang dimintai informasi disebut dengan informan. Di dalam Suyanto dan Sutinah (2011: 171-172), yang dimaksud dengan informan adalah orang yang memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu 26 orang

Pembahasan

Berdasarkan gambaran kepemimpinan di atas maka dalam pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan terkait dengan kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan good governance di desa manembo kecamatan passi timur penulis kemudian menemukan bahwa ternyata kepemimpinan yang kerap kali digunakan oleh kepala desa adalah *selling/Instruktif dan Konsultatif*. Setelah melakukan pengamatan dan melanjutkan penelitian melalui interview secara mendalam dengan beberapa informan maka berdasarkan analisis dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa manembo dalam menjalankan kepemimpinan cenderung menggunakan gaya kepemimpinan yang berpola pada gaya Instruktif dan Konsultatif. Artinya dalam konteks tertentu dalam proses pengambilan keputusan kedua tipe kepemimpinan yang dikemukakan oleh *Hersey dan Blanchard* menjadi alternatif utama gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala desa manembo. Hal ini kemudian sejalan dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang Informan dengan Inisial NM selaku kepala dusun Mengemukakan bahwa *"Kami selaku bawahan dalam menjalankan tugas kami selalu diberi pengarahan-pengarahan yang sangat ketat dan cenderung mendapatkan instruksi dari kepala desa, tapi dalam soal lain pimpinan kami juga selalu menjukan pola hubungan yang cukup tinggi dengan kami selaku bawahan."* Hal tersebut juga senada dengan yang di katakan oleh informan AS juga selaku kepala dusun dimana beliau mengatakn bahwa *"mengenai kepemimpinan kepala desa dalam mewujudkan good governance tentunya kepala desa telah*

berupaya semaksimal mungkin agar setiap persoalan dan kegiatan desa berjalan dengan baik".

Kemudian pada tataran kualitas sumberdaya bawahan dapat disimpulkan sudah sangat mumpuni. Hal ini kemudian dibuktikan dengan hasil wawancara secara mendalam dengan beberapa aparat desa manembo dimana mereka telah sanagt-sangat memahami Tupoksi mereka dan mereka selalu bertanggung jawab dengan tugas yang diembankan kepada mereka. Namun lemah dan kurangnya perhatian dan dukungan dari kepala desa selaku pimpinan dalam upaya menumbukembangkan tanggungjawab mereka. Artinya Mestinya kepala desa manembo dalam proses menerapkan kepemimpinannya mesti disesuaikan dengan situasi dan tingkat kematagn para bawahannya. Baik secara individu maupun secara kelompok. Tentu dalam konteks demikian kepala desa mestinya lebih banyak memberikan kewengana penuh kepada bawahannya terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas spesifik yang bersifat Operasional. Maka sebagai sebuah evaluative kedepan logikanya kepemimpinan kepala desa dalam konteks menerapkan gaya kepemimpinan dalam mewujudkan good governance kepala desa seharusnya menerapkan gaya kepemimpinan dengan pola transparansi, partisipatif dan akuntabel.

Berdasarkan uraian hasil penelitian terkait dengan kepemimpinan kepala desa manembo dalam mewujudkan good governance maka sampailah penulis pada sebuah pra kesimpulan bahwa kepala desa dalam menerapkan gaya kepemimpinan cenderung mengarah pada gaya Instruktif dan konsultatif, sehingga menjadikan bawahannya tidak bisa mengembangkan potensi dan terpola pada kebekuan komunikasi yang cenderung kakuh yang merujuk pada sebuah tatanan pemerintahan dimana sebuah pekerjaan dan tugas-tugas pelayanan publik baru bisa dikerjakan apabila sudah ada intuksi atau perintah dari pimpinan (kepala desa) sehingga pada giliran sangat mengganggu kualitas pelayan publik di desa manembo.

Kondisi-kondisi dalam deskripsi

diatas telah menggambarkan secara jelas dan tegas serta memperkuat asumsi penulis bahwa dalam mewujudkan good governance kepemimpinan kepala desa bisa dikatakan belum maksimal hal ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian penerapan gaya kepemimpinan kepala desa yang sesuai dengan situasi yang ada di desa manembo, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa efektifitas pelayanan kepada masyarakat tergantung kepada efektifitas kepemimpinan kepala desa manembo dalam penerapan gaya kepemimpinan. Selanjutnya untuk memperkuat argument diatas penulis kemudian melakukan wawancara dengan salah satu informan dengan inisial : GM selaku ketua BPD Mengemukakan bahwa : *“dalam menjalankan tugas dan kerja-kerja kami selaku mitra kerja pemerintah desa seperti halnya ketika kami selaku BPD meneruskan aspirasi masyarakat mengenai transparansi dari pemerintah desa akan tetapi kepala desa seperti acuh tak acuh dan hanya sekedar mendengarkan saja”*. Begitupun halnya dengan wawancara dengan informan RM selaku kaur ekbang dimana beliau mengatakan *“terkadang kepala desa dalam memberikan perintah sudah di luar tupoksi saya selaku kaur ekonomi pembangunan, dimana seharusnya tugas yang dikerjakan sekdes akan tetapi tugas itu diberikan kepada saya”*.

Dengan mengacu pada bagian-bagian uraian diatas maka penulis kemudian menemukan bahwa ternyata kepemimpinan mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk karakter dan tingkat kematangan pemimpin dalam mewujudkan good governance. Artinya dalam konteks kepemimpinan kepala desa manembo kecamatan passi timur penulis menemukan gaya kepemimpinan yang diterapkan adalah gaya kepemimpinan Instruksi dan konsultatif. Intruski diberikan bagi bawahan yang rendah kematangannya. Orang yang tidak mampu dan mau memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan sesuatu adalah tidak kompeten atau tidak memiliki keyakinan.

1. Transparansi

Transparansi atau keterbukaan adalah memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan guna terwujudnya penyelenggaraan pemerinthan yang baik. keterbukaan informasi penyelenggara pemerintahan memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat. Dengan indikator diatas adapun pertanyaan wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber yakni petugas kepala Kepala Desa beliau mengatakan, *“mengenai hal transparansi saya selaku kepala desa selalu berupaya untuk terus transparan kepada masyarakat mengenai kegiatan yang ada di desa, baik itu kegiatan yang memakai dana desa ataupun kegiatan lainnya”*. Hal tersebut juga senada dengan yang dikatakan oleh sekretaris desa dimana beliau mengatakan *“untuk transparansi kami pemerintah desa dalam mewujudkan good governance selalau menginformasikan setiap penggunaan keuangan desa dan setiap ada kegiatan kami selalu sampaikan kepada masyarakat khususnya masyarakat desa manembo”*. Dari hasil wawancara dengan kepala desa dan sekretaris desa mengenai transparansi pemerintah desa dalam mewujudkan good governance di dapati pemerintah desa telah transparan akan setiap hal-hal yang menyangkut kegiatan pemerintahan. Akan tetapi setelah peneliti meneliti lebih lanjut salah satu informan yang selaku masyarakat desa manembo berbeda pendapat dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah desa itu sendiri dimana beliau mengatakan *“mengenai transparansi menurut saya pemerintah desa manembo belum menunjukkan transparansi yang jelas. memang pemerintah desa setiap ada kegiatan desa selalu menyampaikan lewat pengeras suara kegiatan-kegiatan yang akan di laksanakan baik itu pembangunan maupun kegiatan lain. Akan tetapi hasil dari kegiatan itu tidak keseluruhannya di informasikan kepada masyarakat, oleh karena itu tentunya kami selaku masyarakat tetap bertanya-tanya mengenai hasil dari kegiatan tersebut”*.

Berdasarkan hasil penelitian tentang transparansi yang dilakukan pemerintah

desa manembo di dapat masih adanya ketidakpuasan dari masyarakat dengan kepemimpinan kepala desa manembo yang ada. Oleh karena itu alangkah baiknya pemimpin desa manembo atau kepala desa manembo dalam menginformasikan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan mempergunakan media informasi yang ada baik itu pengeras suara dan juga diperjelas dengan informasi di papan informasi desa.

2. Partisipasi

Keberhasilan seorang pemimpin di desa tidak dapat dilepaskan dari adanya partisipasi anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagian yang sangat integral yang sangat penting dalam proses dinamika pembangunan sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, karena secara prinsip guna mewujudkan pemerintahan yang baik seorang pemimpin itu bertanggung jawab atas berhasil tidaknya pembangunan tidak saja ditangan pemerintah tetapi juga ditangan masyarakat.

Oleh karena itu kepemimpinan kepala desa dan kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, dalam hal ini mencapai target pembangunan perlu ditunjukkan oleh kebijaksanaan pemerintah. Sehubungan dengan itu dapat dikatakan bahwa pembangunan yang sedang dalam proses ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat. Melihat bentuk partisipasi yang dikemukakan di atas, bagi masyarakat Desa manembo dengan corak kehidupannya untuk mencapai sukses pembangunan hendaknya lebih mengetahui kemampuan dan keadaan nyata dengan memperhatikan aspek-aspek pokok yang berkaitan dengan pembangunan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu aparat desa manembo yang mengatakan bahwa: *“dalam mewujudkan pemerintahan yang baik tidak semua program pembangunan yang ada bisa terlaksana di Desa manembo, pembangunan di Desa manembo tetap memperhatikan kondisi masyarakat, lingkungan, dan manfaat dari pembangunan yang akan di laksanakan,*

selain itu tidak semua pembangunan yang ada, semua masyarakat bisa berpartisipasi aktif, karena memang harus melihat apakah pembangunan di tujukan untuk masyarakat atau tidak”. Mengenai hal tersebut di kaitkan dengan kepemimpinan kepala desa manembo dalam mewujudkan good governance melalui partisipasi dari masyarakat menurut salah satu masyarakat *“gaya kepemimpinan dari kepala desa kami dalam menghuimbau kami selaku masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam kegiatan desa memang di akui sangat baik, ini dilihat dengan keberadaan kepala desa yang juga turut serta dalam melakukan kerja bakti bersama masyarakat”*. Hal ini tentunya salah satu hal positif yang dilakukan seorang pemimpin dengan turut serta bekerja demi kepentingan bersama, akan tetapi masih juga di dapat masyarakat yang acuh tak acugh atas kegiatan desa atau kurang berpartisipasi hal ini di ungkapkan oleh seorang kaur ekbang dimana beliau mengatakan *“terkadang ada beberapa masyarakat yang jarang ikut berpartisipasi dalam kegiatan desa apalagi kegiatan itu kerja bakti beberapa masyarakat cenderung acuh dan tidak memperdulikan”*.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut mengenai kepemimpinan kepala desa manembo dalam mewujudkan good governance dilihat dari partisipasi dapat dikatakan cukup baik, ini dilihat dengan gaya kepemimpinan kepala desa yang ikut terjun langsung bekerja dengan masyarakat dalam prose kerja bakti. Akan tetapi diharapkan untuk terus menghimbau kepada masyarakat yang masih ada yang sering acuh tak acuh akan berpartisipasi dalam kegiatan desa khususnya di desa manembo.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah memberikan pertanggung jawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada publik yang memiliki hak pertanggung jawaban. Secara singkat akuntabilitas disini menunjukkan pada tanggung jawab pada kelalaian, propesionalisme serta menjalankan prosedur dan mekanisme dalam melayani masyarakat. Akuntabilitas dimasukkan dalam sebagai salah satu indikator prinsip-prinsip good governance karena akuntabilitas secara

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari penjelasan di atas akuntabilitas kepala desa manembo dalam mewujudkan good governance sangat diharapkan agar tujuan dari kegiatan ayang ada di desa manembo berjalan dengan baik, berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai akuntabilitas di dapati pemerintah desa manembo dalam setiap kegiatan yang ada selalu memberikan pertanggungjawaban sesuai kegiatan ayang ada. Akan tetapi menurut seorang masyarakat mengenai pertanggungjawaban tersebut alangkah baiknya juga di informasikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan berita simpang siur antar masyarakat tentang pertanggungjawaban tersebut.

Penutup

Kesimpulan

1. Kepemimpinan kepala desa manembo dilihat dari transparansi dalam mewujudkan good governance belum berjalan dengan baik, ada beberapa kegiatan yang tidak di informasikan pemerintah dari beberapa kegiatan yang ada di desa manembo.
2. Mengenai kepemimpinan kepala desa manembo di lihat dari partisipasi di dapati sangat berpartisipasi hal ini dibuktikan dengan terus terlibat dalam kegiatan yang ada.
3. Akuntabilitas, kepemimpinan kepala desa dalam mempertanggung jawabkan kegiatan desa sudah sangat baik hal ini di dapati dengan pertanggungjawaban-pertanggungjawaban yang selalu diberikan pemerintah desa.

Saran

1. Selalu transparan akan setiap kegiatan di desa agar tidak menimbulkan kekisruan dengan masyarakat yang ada di desa manembo.
2. Lebih lagi menghimbau kepada masyarakat yang jarang ikut serta dalam berpartisipasi dalam kegiatan yang ada khususnya di desa manembo.

3. Selalu mempertanggungjawabkan setiap kegiatan-kegiatan yang menyangkut pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Danim, Sudarwan. 2004. *Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Didin Kurniadi, 2012. *Manajemen Pendidikan, Konsep dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan*, Jogjakarta: Ar-Ruz Media,
- Dwipayana dan Sutoro Eko, “*Membangun Good Governance Di Desa*” (IRE Press, Yogyakarta, 2003)
- Juliansyah, 2011. *Metodologi Penelitian* (Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah). Jakarta : Kencana Prenada Media Group Prihatmoko
- Kartono, Kartini, 2003, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Martinis Yamin dan Maisah. 2010. *Kepemimpinan dan manajemen masa depan*. Bogor: IPB Press
- Mardiasmo, 2009. *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*, Jurnal Akuntansi Pemerintah
- Ndaraha, Talidziduhu, 2003, *Kybernologi 2* (ilmu pemerintahan baru). PT. Asdi Mahasatya, Jakarta: Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Teori & praktek kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sedarmayanti. 2003. “*Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*”. Bagian Kedua, Bandung: Mandar Maju.
- Terry, George 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*, penerjemah G.A Ticoalu. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah, Prof, 2003, *Birokrasi Politik di Indonesia*, Jakarta: PT RAJAGRAPHINDO PERSADA.
- Thoha Miftah., (2010), *Pembinaan Organisasi, proses dianosa dan intervensi, Manajemen Kepemimpinan*. Yogyakarta, Gava Media.
- Turney.C. (1992) Dalam Martinis dan Maisah.(2010:74). *Manajemen dan*

EKSEKUTIF

Volume 2 No. 2 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Kepemimpinan.

Wahjosumidjo 2005. *Kepemimpinan,
Tinjauan Teori dan Permasalahannya.*
Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumber Lain :

**Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa**